

**PERANAN BP4KKP DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN  
SEKTOR BERAS DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2010-2014**

**RICKHY**

[rickhy@gmail.com](mailto:rickhy@gmail.com)

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin M,Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -

Telp/Fax. 0761 - 63277

**ABSTRACT**

Symptoms of the highlights of this study is the low rice production area as well as food insecurity levels are high enough in Indragiri Hulu. Food security means food security conditions of both quantity and quality, safe, nutritious, diverse, equitable and affordable by the people's purchasing power. In addition to the threat of land conversion that continue to occur, the level of food insecurity is also due to the low price of rubber and palm oil have an impact on people's purchasing power. This study applies the theory of the role and implementation of policies with particular emphasis on programs conducted by BP4KKP in improving food security in Indragiri Hulu.

Furthermore, this study used qualitative methods, implemented in particular in BP4KKP. The data obtained through the interview and literature study that supports extracting comprehensive information to further analyzed through descriptive analysis techniques. These results indicate that the Executive Agency of Agricultural Extension, Fisheries and Food Security Godhead (BP4KKP) in efforts to improve food security in the rice sector have carried out the planning and implementation of activities in accordance with the duties and functions given to BP4KKP. Despite the fact that efforts to increase food security in the rice sector faced constraints land conversion of agricultural land into plantations. The findings of subsequent studies is that the factors that affect BP4KKP in improving food security is the coordination does not go smoothly between the provincial government and district / city, the diversity of food and balanced nutrition for the consumption of the population Riau that still need to be improved, the prevalence of potential areas of food insecurity, lack of resources manpower and limited funds the implementation of activities.

Keywords: Food Security, Roles, Policie

**PENDAHULUAN**

Pemenuhan ketahanan pangan tidak saja merupakan hal yang sangat

penting untuk diwujudkan, baik dari sisi sosial maupun moral namun juga

merupakan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai salah satu semangat pemenuhan pangan diartikan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat bangsa, karena secara historis bangsa Indonesia memiliki sifat memenuhi kebutuhan pangan sebagai suatu budaya yang melembaga dan bersifat ritual, sehingga penciptaan kondisi ketahanan pangan akan meningkatkan kedaulatan berbangsa dan bernegara, untuk itu diperlukan pola manajemen tersendiri yang secara komprehensif mencakup berbagai sektor dan aktivitas sebagai suatu kesatuan sistem.

Dari berbagai faktor penyebab masalah kurang pangan dan kurang gizi, kemiskinan dinilai memiliki peranan penting dan bersifat timbal balik, artinya kemiskinan akan menyebabkan kerawanan pangan dan kurang gizi dan individu yang kurang pangan dan gizi akan dekat dengan persoalan kemiskinan. Masalah kurang pangan dan gizi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses permiskinan melalui tiga cara. Pertama, kurang pangan dan gizi secara langsung menyebabkan hilangnya produktivitas karena kelemahan fisik. Kedua, kurang pangan dan gizi secara tidak langsung menurunkan fungsi kognitif dan berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan. Ketiga, kurang gizi dapat menurunkan tingkat ekonomi keluarga karena meningkatnya pengeluaran untuk berobat sebagai akibat penyakit-penyakit yang diakibatkan ataupun terkait dengan masalah kurang gizi.

Kondisi ketahanan pangan di Indragiri Hulu selama empat tahun terakhir (2010-2014) terutama beras

mengalami peningkatan produksi sebesar 5,73 % pertahun, namun Kabupaten Indragiri Hulu hanya mampu mendukung maksimal 25 % kebutuhan konsumsi penduduk. Untuk melengkapi pangan (beras) harus didatangkan dari luar Kabupaten maupun dari luar Provinsi Riau. Kondisi tersebut merupakan gambaran bahwa pertumbuhan produksi beras belum mampu mencukupi perkembangan kebutuhan. Kebutuhan konsumsi penduduk dan ketersediaan pangan (beras) di INHU tergantung pada kelancaran dan kesinambungan/distribusi pangan baik antar kabupaten, provinsi maupun impor.<sup>1</sup>

Persoalan mendasarnya adalah program peningkatan ketahanan pangan (khususnya beras) yang dirancang dalam rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah belum menunjukkan hasil yang nyata. Sampai saat ini INHU belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, artinya secara tidak langsung program peningkatan ketahanan pangan belum berhasil. Setidaknya pada tahun 2010 silam terdapat beberapa kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini kontras dengan kondisi daerah yang dikenal subur dan dapat dijadikan lumbung padi daerah. Ketahanan pangan selain dilihat dari ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup juga dilihat dari kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan, dari dua aspek itu Kabupaten Indragiri Hulu

---

<sup>1</sup> LAKIP Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Tahun 2014

tergolong dalam wilayah rawan pangan.

Memang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan upaya peningkatan pangan dengan menggalakkan beberapa program strategis sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Kabupaten INHU sendiri. Upaya itu diwujudkan dalam bentuk penyediaan dana/modal bagi petani, peningkatan infrastruktur pertanian serta distribusi pupuk. Akan tetapi program-program itu tidak berkelanjutan sampai pada fase distribusi dan *market* hasil pertanian masyarakat di pasar domestik. Akibatnya adalah hasil pertanian masyarakat hanya menjadi kegiatan seremonial pemerintah dalam bentuk panen raya yang mendatangkan pejabat ke daerah-daerah sentra pertanian yang kemudian diliput oleh berbagai media.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan telah menetapkan sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan di Indragiri Hulu sebagai berikut;

1. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2200 Kkal/Kap/hari untuk energi dan 57 Gram/Kap/hari untuk protein.
2. Tercapainya Konsumsi Pangan penduduk sesuai dengan pola pangan harapan dengan konsumsi energi sebesar 2000 Kkal/Kap/hari dan protein 52 Gram/Kap/hari .
3. Meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi dengan pendekatan beragam,

berimbang,dan bergizi dengan kontribusi padi-padian 53,6 %, Umbi-umbian 3,0%, kacang-kacangan 2,4 %, Pangan Hewani 7,1 %, sayur dan buah 3,8 %, minyak dan lemak 16,5 %, gula 6,5 %.

4. Berkurangnya daerah rawan pangan di 14 (empatbelas) Kecamatan.
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani pangan dan kelembagaan Ketahanan Pangan masyarakat di 14 (empatbelas) Kecamatan

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah; Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010-2014?

## **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **a. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui;

1. Peranan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010-2014.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Dalam Peningkatan

Ketahanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010-2014.

#### **b. Kegunaan penelitian**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan penyediaan pangan khususnya dan peningkatan pembangunan ketahanan pangan pada umumnya di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bagi pihak-pihak terkait yaitu pihak akademisi dan pihak peneliti lainnya dapat dijadikan sebagai rujukan informasi untuk dapat mengkaji lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang sama.

### **TINJAUAN TEORI**

#### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ketahanan Pangan**

Pada mulanya pengertian ketahanan pangan terfokus pada kondisi pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Namun, berdasarkan kesepakatan pada *International Food Submitt and International Conference of Nutrition 1992*, pengertian ketahanan pangan dipertuas menjadi kondisi tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Pengertian ketahanan pangan yang terakhir ini bersifat holistik dan mengandung makna yang selaras dengan paradigma baru kesehatan. Makna yang terkandung dalam pengertian ketahanan pangan tersebut mencakup dimensi fisik

pangan (ketersediaan), dimensi ekonomi (daya beli), dimensi pemenuhan kebutuhan gizi individu (dimensi gizi) dan dimensi nilai-nilai budaya dan religi (pola pangan yang sesuai untuk hidup sehat, aktif dan produktif serta halal), dimensi keamanan pangan (kesehatan) dan dimensi waktu (tersedia secara berkesinambungan).<sup>2</sup>

Pembangunan sub sistem penyediaan mencakup pengaturan dan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik produksi domestik, cadangan maupun impor. Pembangunan sub sistem distribusi mencakup pengaturan untuk aksesibilitas penduduk secara fisik dan ekonomis terhadap pangan antar waktu, serta stabilitas harga pangan strategis. Pembangunan sub sistem konsumsi mencakup pengelolaan pangan di tingkat daerah maupun rumah tangga, untuk menjamin setiap individu memperoleh pangan dalam jumlah, mutu gizi, keamanan dan keragaman sesuai kebutuhan dan pilihannya.

Ketiga sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan yang didukung oleh adanya berbagai input sumberdaya alam, kelembagaan, budaya, permodalan dan teknologi. Proses pembangunan ketahanan pangan ini digerakkan oleh kekuatan masyarakat dalam usaha agribisnis pangan yang ditopang oleh fasilitas pemerintah. Partisipasi masyarakat dimulai dari proses produksi, industri pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa pelayanan di bidang pangan. Sedangkan fasilitas

---

<sup>2</sup>Hak Azasi Manusia. Makalah Pada Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan, Jakarta 13 April 2005.

pemerintah diimplementasikan melalui kebijakan ekonomi makro dan perdagangan, pelayanan, pengaturan, penyediaan sarana dan prasarana serta intervensi atas kegagalan pasar untuk mendorong terciptanya pangan agribisnis yang berkeadilan. Ketahanan pangan akan tercapai apabila setiap sistem berjalan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh *stakeholders* disertai dengan dukungan penuh dari pemerintah dalam mengambil kebijakan yang mendukung semua pihak tanpa mengutamakan kepentingan salah satu pihak.<sup>3</sup>

Dengan demikian ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing-masing sub sistem tersebut tercermin dari stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (*food utilization*) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga.<sup>4</sup> Lebih lanjut Suryana mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan ketiga sub sistem ketahanan pangan tersebut perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana dan kelembagaan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan dan sebagainya. Di samping itu perlu didukung oleh faktor-faktor penunjang seperti kebijakan, peraturan, pembinaan dan pengawasan pangan. Ketahanan pangan dilaksanakan oleh banyak pelaku (*stakeholder*) seperti produsen, pengolah, pemasar dan konsumen yang dibina oleh berbagai

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Jakarta

institusi sektoral, sub sektoral serta dipengaruhi interaksi antar wilayah. *Output* yang diharapkan dari pembangunan ketahanan pangan adalah terpenuhinya hak azasi manusia akan pangan, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional.<sup>5</sup>

Maxwell dan Smith mengatakan bahwa ketahanan pangan menunjukkan adanya akses setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap waktu. Hal ini berarti ketahanan pangan memiliki empat dimensi yaitu : a) kecukupan pangan, yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi untuk aktif dan hidup sehat, b) akses pangan, yang berarti adanya kemampuan untuk memproduksi, membeli pangan maupun menerima pemberian pangan, c) jaminan, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan dan d) waktu, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pang an secara berkelanjutan.<sup>6</sup>

## **2.Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan**

Kebijakan merupakan penjabaran secara normatif komitmen pemerintah dalam pembangunan sehingga menjadi acuan tindakan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.<sup>7</sup> Menurut Bappenas,

---

<sup>5</sup> Suryana A 2003. Kapita Selektta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan, BPFE: Yogyakarta

<sup>6</sup> Maxwell, S. Dan Smith, M. 1997. Household And Food Security :A Conceptual Review dalam Simon Maxwell dan Timothy R. Frankenberger (eds) Household Food Security : Concept, Indicator, Measurement, Uniceps. New York.

<sup>7</sup> Martianto. D,Baliwati.YF, Dahrulsyah Dan Handewi. 2007. Laporan Akhir Koordinasi Kebijakan Solusi Sistemik Masalah Ketahanan Pangan Dalam Upaya Perumusan Kebijakan

kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana atas pelaksanaan suatu pembangunan. Dokumen kebijakan terkait ketahanan pangan pada tingkat pusat tertuang dalam RPJM 2005-2009, KUKP dan Renstra Departemen Pertanian dan di tingkat daerah pada Renstra Provinsi/Kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) 2005-2009 menyebutkan bahwa untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai di tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan.<sup>8</sup>

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 1) pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan pertuasan areal pertanian, 2) peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur pedesaan yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan, 3) peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil, 4) diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasa sosial terfladap pola konsumsi masyarakat menuju

---

Pengembangan Penganeekaragaman Pangan;  
Kementriaan Koordinator Bidang  
Perekonomian Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006- 2010*. Jakarta. 2007

pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal, 5) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, melalui peningkatan bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dan pengembangan sistemantisipasi dini terhadap kerawanan pangan.<sup>9</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Metode yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 1990).

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BP4KP Kabupaten Indragiri Hulu.

### **2. Informan Penelitian**

*Informan* penelitian ini dipilih secara *purposive* berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan *informan* secara *purposive* ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

dalam penelitian ini. Alasan pemilihan informan secara *purposive* ini adalah karena teknik *purposive* yang paling memungkinkan digunakan pada studi-studi kualitatif.

### 3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, adalah data diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terbuka dengan informan penelitian. Data ini berupa kutipan wawancara langsung dan hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan arsip, dokumen-dokumen segala bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang perlu diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah:

1. Wawancara, yaitu menyusun daftar pertanyaan terbuka untuk dijawab oleh informan penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu menelusuri data-data dokumenter yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda seperti menelusuri arsip-arsip dan laporan kegiatan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Umum Kabupaten Indragiri Hulu

#### 1.1. Luas dan Letak Wilayah<sup>10</sup>

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km<sup>2</sup> (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut

---

<sup>10</sup> www.wikipedia. Diakses pada desember 2015

Kabupaten Indragiri Hulu terletak di :

- 0°15' Lintang Utara
- 1°5' Lintang Selatan
- 101°10' Bujur Timur
- 102°48' Bujur Timur

### 1.2. Batas Wilayah

Kabupaten Indragiri Hulu Berbatasan dengan

- Sebelah Utara dengan kabupaten Pelalawan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Propinsi Jambi)
- Sebelah barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

### 1.3. Jarak Ibukota Kecamatan Denan Ibukota Kabupaten

Ibukota kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Ibukota kecamatan batang Peranap dengan jarak 96 km, sedangkan jarak terdekat dengan ibukota kabupaten adalah ibukota kecamatan rengat yaitu 0 km.

### 2. Uraian Singkat Tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan<sup>11</sup>

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Indragiri Hulu dan mengatasi permasalahan pokok di Kabupaten Indragiri Hulu terutama yang menyentuh langsung pada masyarakat antara lain ekonomi, Kebutuhan Pangan, Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan lain lain,

---

<sup>11</sup> Renstra Tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu 2014

maka oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menjadikan 3 (tiga) fokus utama pembangunan daerah yang meliputi Pengetasan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pembangunan Instuktur.

Peningkatan Ketahanan Pangan merupakan Motor Penggerak yang akan memperkuat fokus-fokus tersebut, terutama fokus Pengetasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang menetapkan Pembentukan Satuan Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan melalui Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2008, adalah tepat mengingat semakin besarnya dampak Globalisasi terhadap tingkat Akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok masyarakat yakni Sandang, Pangan, dan Papan.

Pangan merupakan kebutuhan mendasarkan manusia sehingga kecukupan pangan harus terpenuhi secara terus menerus, stabil dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam UU No. 7 Tahun 1996, menyatakan bahwa pemerintah bersama rakyat bertanggung jawab atas terwujudnya bahan pangan yang mantap, melalui pengembangan subsistem yang termuat dalam sistem Ketahanan Pangan, yaitu Subsistem Ketersediaan Pangan, Subsistem Distribusi dan Subsistem Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pemerintah berperan dalam hal pembinaan, pengetahuan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pangan dalam hal jumlah dan mutu pangan, keragaman, keamanan, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Di lain pihak masyarakat berperan aktif menyelenggarakan produksi dan pengadaan bahan pangan, menyelenggarakan kegiatan perdagangan dan distribusi.

Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Mengingat 80 % (persen) penduduk Kabupaten Indragiri Hulu berdomosili di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun, maka pembangunan Sumber Daya Manusia perlu di arahkan melalui kebijakan yang tepat.

Maka tidak ada pilihan lain kecuali Sumber Daya Manusia pertanian yang merupakan salah satu faktor penggerak utama yang akan memperkuat pembangunan ekonomi masyarakat untuk menuju Ketahanan Pangan yang tangguh.

Penyuluhan Pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam upaya pencapaian Swasembada pangan daerah melalui upaya peningkatan adopsi teknologi menuju peningkatan produksi pertanian. Penyuluhan Pertanian adalah upaya membangun kemampuan dan kemandirian petani secara persuasif, edukatif, yang dilakukan melalui proses pembelajaran petani dengan menerapkan prinsip – prinsip Penyuluhan Pertanian yang berdampingan dengan kegiatan pendampingan lainnya di dukung oleh adopsi dan transformasi teknologi pertanian yang handal. Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan melalui kelembagaan tani, akan memberikan sentuhan langsung kepada para petani



dan keluarganya, sehingga aspek Ketahanan Pangan dapat terpantau lebih dekat.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu akan bekerja dan berusaha mewujudkan Ketahanan Pangan yang mantap di Kabupaten Indragiri Hulu melalui tugas dan fungsinya dalam aspek evaluasi. Disamping itu upaya pelaksanaan fungsi Pengkajian dan Penelitian, Pelatihan serta Penyuluhan akan terus dikembangkan.

Dalam upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu, diperlukan kerangka acuan dan kebijakan yang tepat dan terarah yang diharapkan mampu mempercepat terciptanya Ketahanan Pangan yang tangguh menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Salah satu upaya yang dinilai sangat berperan penting dalam pencapaian sasaran adalah adanya “ Rencana Strategis “ yang dapat dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Dengan demikian setiap Subsistem yang terlibat di dalamnya memiliki satu persepsi, sehingga akan diperoleh satu kesatuan gerak dan langkah dalam pelaksanaan operasional dilapangan yang bermuara pada Percepatan Pencapaian Ketahanan Pangan Daerah.

### **3. Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan<sup>12</sup>**

Secara umum tujuan pembangunan Ketahanan Pangan yaitu mewujudkan dan menegembangkan sistem Ketahanan Pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. Melalui pengembangan Sub sistem Ketersediaan Pangan, Sub sistem Konsumsi Pangan, Sub sistem Distribusi, mutu, dan Keamanan Pangan dengan memperhatikan potensi keragaman, sumberdaya pangan dan budaya serta kultur setempat. Secara rinci, tujuan pembangunan Ketahanan Pangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu dalam perumusan kebijakan umum Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan Koordinasi dan peran instansi terkait serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan.
3. Meningkatkan kemampuan membangun subsistem Ketersediaan, subsistem Konsumsi, dan subsistem distribusi yang sinergik dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kewaspadaan pangan di tingkat kecamatan dan desa dengan meningkatkan kemampuan mengenali dan mengantisipasi secara dini masalah kerawanan pangan.

---

<sup>12</sup> Penjabaran Rencana Strategis **Tentang** Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kab. Indragiri Hulu Tahun 2014

5. Meningkatkan diversifikasi Konsumsi Pangan, mengenai mutu dan keamanan pangan yang beragam, bermutu dan bergizi serta menurunnya tingkat keracunan konsumsi pangan.

#### 4. Sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan<sup>13</sup>

Sasaran yang ingin di capai dalam peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

1. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2200 Kkal/Kap/hari untuk energi dan 57 Gram/Kap/hari untuk protein.
2. Tercapainya Konsumsi Pangan penduduk sesuai dengan pola pangan harapan dengan konsumsi energi sebesar 2000 Kkal/Kap/hari dan protein 52 Gram/Kap/hari .
3. Meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi dengan pendekatan beragam, berimbang, dan bergizi dengan kontribusi padi-padian 53,6 %, Umbi-umbian 3,0%, kacang-kacangan 2,4 %, Pangan Hewani 7,1 %, sayur dan buah 3,8 %, minyak dan lemak 16,5 %, gula 6,5 %.
4. Berkurangnya daerah rawan pangan di 14 (empatbelas) Kecamatan.
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani pangan dan kelembagaan Ketahanan Pangan masyarakat di 14 (empatbelas) Kecamatan

Peningkatan Ketahanan Pangan pada hakekatnya bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas waktu, sehingga dalam pengelolaan

dan penanganannya memerlukan koordinasi yang terpadu. Disamping itu sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan, bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab dalam perwujudan Ketahanan Pangan, hal ini mengisyaratkan bahwa perbedaan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang mayoritas petani/pekebun sangat penting dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

Pemerintah menyelenggarakan pengaturan pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan masyarakat berkewajiban melaksanakan aktifitas yang terkait dalam perwujudan Ketahanan Pangan, seperti peningkatan produksi, transformasi teknologi pertanian secara luas (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan) aktivitas distribusi pangan.

Peningkatan Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan berbasis bersumberdaya pangan, kelembagaan, dan budaya lokal dengan memperhatikan pendapatan masyarakat hal ini mengisyaratkan sejauh mungkin kebutuhan pangan di penuhi dari produksi sendiri dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan Sumber Daya Alam melalui penyuluhan Pertanian dan bertumpu pada budaya lokal daerah kita.

Program pembangunan Ketahanan Pangan dan penyuluhan pertanian tahun 2009 – 2015, merupakan program jangka menengah, yang dalam penyusunannya didasarkan pada

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

tujuan jangka panjang, mengacu kepada permendagri No 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, program dimaksud dapat dirumuskan dalam 4 (empat) program utama:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
4. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

#### **5. Peranan BP4KKP Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Sektor Beras di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010-2014**

Peningkatan ketahanan pangan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Bahkan ketahanan pangan sudah menjadi isu nasional yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak sebagai upaya penguatan kapasitas dan daya saing bangsa. Masalah utama secara nasional yang berkenaan dengan pemantapan ketahanan pangan itu antara lain;<sup>14</sup>

1. Kemampuan ketahanan pangan masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan pangan dan mengakses pangan.
2. Ketergantungan konsumsi beras masih cukup tinggi dan belum optimalnya pemanfaatan pangan

lokal untuk konsumsi pangan harian.

3. Cadangan pangan pemerintah masih terbatas (hanya beras dan dikelola oleh pemerintah pusat), sementara cadangan pemerintah daerah dan masyarakat belum berkembang.
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk, karena budaya dan kebiasaan makan masyarakat kurang mendukung konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
5. Belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan pangan lokal untuk mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan.
6. Masih terjadinya kasus keracunan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan sehingga menimbulkan rendahnya ketahanan pangan masyarakat.
7. Belum memadainya prasarana dan sarana transportasi baik darat dan terlebih antar pulau, sehingga meningkatkan biaya distribusi pangan.
8. Jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar, meskipun telah menunjukkan trend yang menurun.

Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Kabupaten yang sudah cukup dewasa belum menunjukkan kemajuan yang berarti dari aspek produksi pangan khususnya beras, malahan komoditas beras mengalami defisit yang semakin bertambah. Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas bermata pencaharian pada lapangan usaha pertanian sebanyak 44,11% (tahun 2010), dimana sebagian besar

---

<sup>14</sup> Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam angka tahun 2010.

penduduk miskin berada pada kelompok masyarakat ini yang dominan bermukim di perdesaan. Dari kedua kondisi ini menggambarkan keluarga tani dengan berbagai masalah kehidupannya, selalu berada pada posisi lemah.<sup>15</sup>

Memang persoalan ketahanan pangan merupakan persoalan yang sangat rumit dan membutuhkan perhatian ekstra dari semua pihak. Terlebih dengan semakin maraknya perubahan orientasi masyarakat untuk bekerja di sektor industri serta semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian (sawah/ladang) menjadi perkebunan semakin berdampak pada rendahnya produktivitas pangan daerah serta minimnya ketersediaan pangan di daerah. Dampak ikutan dari hal itu tentu saja ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar daerah, pusat maupun luar negeri.

Keberadaan BP4KP tentu saja tidak begitu bermanfaat tanpa diiringi oleh kapasitas penyusunan kebijakan yang berkenaan dengan pemantapan ketahanan pangan di daerah. Walaupun demikian setidaknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indragiri Hulu khususnya melalui berbagai kegiatan diantaranya:

#### **A. Koordinasi Lintas Sektoral**

Pelaksanaan pengembangan Ketahanan Pangan melibatkan banyak pelaku dari berbagai aspek serta mencakup interaksi antar wilayah, oleh sebab itu pengembangan dan pemantapan Ketahanan Pangan hanya

dapat diwujudkan melalui suatu kerja kreatif dari seluruh pihak yang terkait.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam Keputusan Bupati sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hulu memfasilitasi Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) tingkat Kabupaten dengan tujuan untuk membangun koordinasi program ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan juga merupakan forum strategis yang diadakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengevaluasi, mendiskusikan dan membahas permasalahan/menetapkan langkah-langkah operasional dalam membangun ketahanan pangan.

Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui forum Rapat Dewan Ketahanan Pangan yang melibatkan Dinas/Badan selaku anggota DKP yang terdiri dari :

- Rapat Koordinasi DKP Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Rapat Kelompok Kerja (POKJA) Teknis Provinsi
- Rapat Kelompok Kerja (POKJA) Ahli Provinsi dan Kab/Kota

#### **B. Program/Kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu**

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu dituntut untuk berkerja dan berusaha

<sup>15</sup> *Ibid.*,

mewujudkan Ketahanan Pangan yang mantap di Indragiri Hulu melalui tugas dan fungsinya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pada aspek evaluasi. Disamping itu upaya pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian, pelatihan serta penyuluhan akan terus dikembangkan.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dengan tugas fungsinya melaksanakan program-program pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan yang telah direncanakan dan ditetapkan, program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu yaitu :

*a) Meningkatkan peran serta kelembagaan ketahanan pangan masyarakat dalam mengatasi masalah pangan;*

Kegiatan utama program meliputi:

- Stabilitasasi Harga Komoditas Primer melalui DPM-LUEP

*b) Meningkatkan kualitas pengkajian dan pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;*

Kegiatan utama program meliputi:

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan
- Penanganan Daerah Rawan Pangan
- Kelembagaan Ketahanan Pangan

- Pemberdayaan Lumbung Pangan

*c) Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pemantauan ketahanan pangan.*

Kegiatan utama program meliputi:

- Penyusunan Kebijakan Program, Monev, dan Data Base.
- Revitalisasi SKPG Melalui Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
- Penyusunan Statistik Pangan
- Program Aksi Desa Mandiri Pangan
- Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (Pondok Pesantren)
- Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
- Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan
- Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
- Replikasi SPFS
- Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia, Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan
- Koordinasi Pengembangan Pasca Panen
- Rembug, Mimbar Sarasehan dan Pembinaan Kontak Tani Nelayan Andalan
- Penyuluhan Ketahanan Pangan kepada Kelompok Masyarakat
- Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Persoalannya adalah program-program dan kegiatan itu tidak ada yang secara nyata terlaksana dengan baik dan berkesinambungan, sifatnya

hanya temporer dan sesuai isu komtemporer yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

### **C. Penanganan Daerah Rawan Pangan**

Kondisi dan potensi munculnya gangguan kerawanan pangan di Kabupaten Indragiri Hulu, pada dasarnya bukan hanya disebabkan oleh kekurangan produksi pangan daerah, namun lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan penduduk, tingkat pengetahuan dan pemahaman asupan pangan dan gizi pada ibu rumah tangga, daya jangkau pelayanan dasar kesehatan khususnya layanan vaksinasi pada Balita, status gizi Balita serta potensi ancaman bencana alam banjir yang secara rutin terjadi sebagian wilayah Kab. Indragiri Hulu dan daya jangkau transportasi bahan pangan di pedesaan.

Pengukuran kinerja berkurangnya tingkat kerawanan pangan di daerah antara lain didasarkan pada menurunnya persentase penduduk miskin, meningkatnya rasio kemampuan produksi pangan pokok (beras, jagung dan umbi-umbian), meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, meningkatnya cakupan pelayanan dasar kesehatan pada masyarakat, serta meningkatnya status gizi Balita. Berkurangnya daerah yang berpotensi rawan pangan merupakan hasil kinerja sistem yang berlangsung secara berkesinambungan yang diukur dalam kurun waktu lima tahun. Analisis kerawanan pangan di Kabupaten Indragiri Hulu dimulai pada tahun 2004, dengan kurun waktu evaluasi 2004-2008 dan 2009-2013.

## **6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi BP4KKP Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Sektor Beras di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010-2014**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam usaha peningkatan ketahanan di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010-2014:

### **A. Koordinasi Tidak Berjalan Lancar Antara Pemerintah Propinsi Dengan Kabupaten/Kota**

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis sewaktu melakukan wawancara dengan pihak Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu tentang rapat koordinasi tidak berjalan lancar antara pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota. Menurut Bapak Agus Rianto Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu rapat koordinasi hanya dijalankan apabila ada masalah atau ada penyuluhan program yang sifatnya berasal dari pemerintah pusat.<sup>16</sup>

Menurut pengamatan penulis seharusnya mereka jauh lebih kreatif dan inovatif, meskipun tidak ada masalah kerawanan pangan yang

<sup>16</sup> Wawancara tanggal 10 Desember 2015

membahayakan namun rapat koordinasi harus tetap terlaksana setidaknya setiap caturwulannya untuk menyusun kegiatan-kegiatan pembangunan ketahanan pangan, mengingat luasnya lahan di Kabupaten Indragiri Hulu yang masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi lahan produksi pangan.

### **B. Keragaman Pangan dan Keberimbangan Gizi Untuk Konsumsi Penduduk**

Tingkat keragaman pangan dan keberimbangan gizi bagi kebutuhan konsumsi penduduk menjadi indikator dalam pencapaian sasaran kualitas sumber daya manusia dimasa mendatang, sehingga substansi tersebut perlu diangkat menjadi *core competence* dalam penentuan kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Hasil wawancara dengan bapak Ir. Yusri (Ka.bid Penganekaragaman Pangan), kegiatan pengembangan keragaman pangan dan keberimbangan gizi merupakan kinerja sistem yang sangat kompleks, sejak dari kinerja ekonomi keluarga, kinerja pengembangan pendidikan dan pelatihan masyarakat serta kesiapan cadangan pangan alternatif yang tersedia antar waktu, antar wilayah dengan harga terjangkau. Hal ini pun dipicu dengan lemahnya daya beli masyarakat terhadap bahan baku makanan dan kurangnya keragaman bahan baku makanan yang ada dipasar.<sup>17</sup>

### **C. Prevalensi Daerah Yang Berpotensi Rawan Pangan**

Prevalensi kerawanan pangan di tingkat spasial (desa) secara

bertahap dapat diantisipasi melalui pendekatan pembangunan pedesaan yang integratif, sebagaimana diarahkan dalam kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah. Pendekatan pembangunan ketahanan pangan berbasis pedesaan dijabarkan melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan yang telah diprogramkan sasaran kinerjanya sampai dengan tahun 2015. Integrasi program antara pendekatan pembangunan pedesaan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga harus menjadi acuan dalam pembangunan spasial.

### **D. Kurangnya Sumber Daya Manusia.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Subari (Pegawai BP4KP), salah satu faktor yang menyebabkan ketidakteraturan petugas dalam melakukan Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidang pangan. Pihak Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu biasanya dalam sekali pendampingan untuk kegiatan dibutuhkan 4 sampai 5 orang tenaga pendamping, namun mereka hanya punya 2 tenaga ahli sehingga Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu biasa meminta bantuan perguruan tinggi. Bahkan pada tingkat Kabupaten/Kota beberapa kegiatan sulit dilakukan karena kurangnya tenaga ahli didaerah yang menguasai

<sup>17</sup> Wawancara tanggal 18 Desember 2015

tentang ketahanan pangan. Akibatnya, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga terkait setelah disosialisasikan kepada masyarakat tidak menunjukkan hasil yang diinginkan, seperti kegiatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Berimbang.<sup>18</sup>

Selain faktor-faktor di atas, secara khusus ditemui kendala dalam peningkatan produktivitas dan produksi beras di Indragiri Hulu dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduknya. Diantaranya yang terpenting adalah :<sup>19</sup>

- 1.) Masih tingginya konversi lahan produktif ke lahan non pertanian tanaman pangan (perumahan, perkebunan, fasilitas sosial);
- 2.) Kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan, perikanan maupun peternakan sehingga hasilnya tidak mampi mensejahterakan petani dan berakibat pada kurangnya investasi untuk peningkatan produksi;
- 3.) Terbatasnya teknologi tepat guna yang dapat diakses oleh petani;
- 4.) Kurangnya bimbingan kepada petani karena tidak difungsikannya institusi penyuluhan pertanian secara optimal seperti pada masa lalu;
- 5.) Jenis tanah yang didominasi oleh podzolik merah kuning dan jenis lahan lain relatif kurang responsif terhadap penggunaan input kimiawi;
- 6.) Sistem pengairan yang sebagian besar masih tadah hujan; dan

---

<sup>18</sup> Wawancara tanggal 18 Desember 2015

<sup>19</sup> LAKIP Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu 2014

- 7.) Rendahnya akses petani terhadap modal usaha

## KESIMPULAN

1. Bahwa upaya dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam usaha peningkatan ketahanan pangan khususnya sektor beras di Kabupaten Indragiri Hulu pada prinsipnya sudah melalui perencanaan. Adapun upaya yang dilakukan meliputi, koordinasi, perumusan program/kegiatan, kegiatan distribusi pangan, percepatan diversifikasi konsumsi pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemberdayaan lumbung pangan, penyusunan kebijakan program, monitoring evaluasi dan data base. Namun demikian, upaya peningkatan ketahanan pangan di sektor beras menghadapi kendala yang cukup berat yakni kendala alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perkebunan serta peralihan orientasi mata pencaharian dari bertani menjadi pekerja industri dan perkebunan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam usaha peningkatan ketahanan sektor beras di Indragiri Hulu tahun 2010-2014 yaitu koordinasi tidak berjalan lancar antara pemerintah propinsi dengan kabupaten/kota, keragaman pangan dan keberimbangan gizi



untuk konsumsi penduduk riau yang masih perlu diperbaiki, prevalensi daerah yang berpotensi rawan pangan, kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan dana pelaksanaan kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006- 2010*. Jakarta. 2007
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009*. Jakarta
- Hak Azasi Manusia. Makalah Pada Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan, Jakarta 13 April 2005.
- Maxwell, S. Dan Smith, M. 1997. *Household And Food Security :A Conceptual Review dalam* Simon Maxwell dan Timothy R. Frankenberger (eds) *Household Food Security : Concept, Indicator, Measurement*, Uniceps. New York.
- Martianto. D,Baliwati.YF, Dahrulsyah Dan Handewi. 2007. *Laporan Akhir Koordinasi Kebijakan Solusi Sistemik Masalah Ketahanan Pangan Dalam Upaya Perumusan Kebijakan Pengembangan Penganekaragaman Pangan; Kementriaan Koordinator*
- Suryana A 2003. *Kapita Selektta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*, BPFE: Yogyakarta
- Bidang Perekonomian Republik Indonesia.